

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA PADA DESA
MESKOM KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik
Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Disusun Oleh

NURUL IKHSAN
NIM. 10875004346



PROGRAM S1

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS EKONOMI
DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
RIAU
2013**

ABSTRAK

“ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA PADA DESA MESKOM KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS”

Oleh : NURUL IKHSAN

Skripsi ini berjudul Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang kondisi di mana demikian besar tugas kepala desa dalam menunjang keberhasilan pembangunan pada suatu desa sehingga perlunya mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah. Hal ini terlihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2008 Pasal 4 Huruf h di mana kepala desa memiliki kewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas kepala desa pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Bentuk atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, Kuesioner dan pengamatan langsung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan tugas kepala desa pada Desa Meskom belum maksimal disebabkan penyalangan urusan pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan belum optimal.

Key words :Pelaksanaan tugas kepala desa (Pelayanan) Pembangunan Dan Kemasyarakatan.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun skripsi yang mengambil judul **“ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA PADA DESA MESKOM KECAMATAN BENGAKALIS KABUPATEN BENGKALIS”** diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian Munaqasah pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, tentunya dengan maksud guna penyempurnaan skripsi ini.

Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Nazir Selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta Staf.
2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan Bapak Rusdi S.Sos selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Drs. H. Zamharil Yahya, MM selaku dosen pembimbing dan Ibu Mustiqowati Ummul Fitria, M.Si selaku dosen Konsultasi Proposal yang telah banyak meluangkan waktu serta pikiran dalam membimbing penulis guna penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Mashuri, MA selaku Penasehat Akademis serta Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Supendi selaku Kepala Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atas bantuannya tidak akan penulis lupakan.
7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Ngadiman (Alm) dan Ibunda Muinah yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta dukungan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Mudah-mudahan perjuangan bapak dan ibu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin.
8. Buat keluarga, abang Kusrianto, abang Mulyadi, kakak Siti Suhana, abang Fauzan, abang Hendri kurniawan, abang M. Rhomaddon (alm) terima kasih atas supportnya selama ini. Juga buat keponakanku; Zakki Safwan hadi, Aurellia Fayolla dan Dian Saftri doa Oom selalu buat kalian semua semoga menjadi anak yang berguna bagi Bangsa dan Negara.

9. Buat teman-teman seperjuangan penulis, terutama Lokal C angkatan 08 Jurusan Administrasi Negara; Nanda Sonefil, M.Ajis, M.Asrofi, Nur Azikin, Imam Mazli Mardiyulis, M. Arpan, Erni Juliani, Hijatul Padma, Rima Dona Fitri, Mega Mustika, Wike Guslianova yang banyak memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, serta buat semua teman-teman Asrama Satria Gading (Edo, Wawan, Labib, Salim, Sani, Hendra, Heri) dan yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, *you're all my best friend*.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kepada semua pihak, selain “*Jazakumullah Khairan Katsiran*” semoga Allah SWT memberikan balasan dan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin..

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Pekanbaru, Februari 2013
Penulis

NURUL IKHSAN
Nim. 10875004346

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PERSEMBAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penelitian	10

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori	12
A. Defenisi Kepemimpinan	12
B. Kepemimpinan dalam Perspektif Islam	13
C. Otonomi Daerah	15
D. Desa	16
E. Tipe Desa.....	17
F. Kewenangan Desa	18
G. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	22
H. Badan Permusyawaratan Desa	22
2.2 Defenisi Konsep	23
2.3 Konsep Operasional	24
2.4 Hipotesis	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Lokasi Penelitian	27
3.2 Jenis Dan Sumber Data	27
3.3 Populasi Dan Sampel.....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Analisis Data	30

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Tempat Pelaksanaan Penelitian	31
4.2 Visi dan Misi Kantor Kepala Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.....	32
A. Visi Kantor Desa Meskom	32
B. Misi Kantor Desa Meskom.....	32
C. Tujuan Kantor Desa Meskom.....	32
D. Sasaran Kantor Desa Meskom.....	33
4.3 Struktur Organisasi Unit Tempat Kerja Penelitian.....	36
4.4 Uraian Tugas (Job Description) Bagian/ Unit Kerja Tempat Penelitian.....	37
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Identitas Responden.....	42
5.1.1 Tingkat Jenis Kelamin Responden	42
5.1.2 Tingkat Umur Responden.....	43
5.1.3 Tingkat Pendidikan Responden	44
5.2 Pelaksanaan tugas Kepala desa pada Desa Meskom	44
5.2.1 Pentingnya Kepala Desa.....	44
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	67
6.2 Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggara pemerintah yang tertib dan lancar merupakan syarat utama bagi terwujudnya tujuan Negara. Pemerintah yang tertib dan lancar tidak akan mungkin tercapai kalau segala permasalahan diatur oleh pemerintah pusat saja, tetapi harus dibantu oleh pemerintrah daerah.

Menurut Misdayani (2001:19) Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan di daerah, dengan kata lain pemerintah daerah adalah penyelenggara pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah merupakan subsistem dari Negara Indonesia. Oleh sebab itu cita-cita dan tujuan pemerintah daerah, selanjutnya tugas-tugas Negara atau tugas-tugas pemerintah juga merupakan tugas-tugas pemerintahan daerah, akan tetapi tidak semua tugas-tugas atau urusan-urusan pemerintah diserahkan pelaksanaannya kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah, serta kepentingan nasional. Pelaksanaan pemerintah daerah terdiri dari tiga azas, yaitu azas desentralisasi, azas dekosentrasi dan azas pembantuan. Dengan adanya azas desentralisasi maka terbentuklah Daerah Otonom. Tujuan pemberian Daerah Otonom kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil peneyelenggaraan

pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan bratakusuma (2004:1) Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan yang menganut azas *desentralisasi* dalam penyelenggaraan pemerintahannya memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi.

undang-undang dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Hanif (2011: 75) Susunan pemerintahan dibagi menjadi tiga: *pertama*, pemerintah bawahan yang berupa desa, atau setingkat dengan desa yang mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri. *Kedua* pemerintah atasan yang berbentuk di kota ibu Negara, republic Indonesia. *Ketiga*, antara pemerintah bawahan dan pemerintah atasan adalah pemerintah daerah, yang disebut dengan pemerintahan tengahan.

Pada 18 agustus 1945 sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia mengesahkan undang-undang dasar. Dalam undang-undang dasar ini desa masuk dalam ketentuan pasal 18 tentang pemerintahan daerah. Pasal ini berbunyi:

1. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu “*eenheidstaats*” maka Indonesia tak akan mempunyai daerah didalam lingkungannya yang bersifat “*staat*” juga. Daerah-daerah Indonesia akan dibagi dalam

daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Daerah itu bersifat otonom.

2. Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 “zelfbestuernde landschappen” dan “volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karena itu dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Pemerintah kemudian mengeluarkan PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tugas Kepala Desa berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa yaitu:

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - c. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 juga dijelaskan tentang tugas Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenangnya yaitu:

1. Penyelenggara urusan Pemerintahan
2. Pembangunan
3. Kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai Wewenang yaitu:

- a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- c. Menetapkan peraturan desa telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakatan desa
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapt menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangn; dan
- i. Melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar 1945, serta mempertahankan serta memelihara keutuhan Negara kesatuan republic Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. Menjalalin hubungan dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undang;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat;
- n. Memperdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

Merujuk pada Undang-undang dan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 di atas, jelas bahwapembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

dari seluruh aspeknya, tidak akan dapat berjalan secara maksimal, bilamana pemerintah desa (Kepala Desa) sebagai orang yang terdepan dengan memiliki kewenangan untuk menggerakkan masyarakat sebagai administrator pembangunan bersifat apatis terhadap kondisi masyarakatnya dan pemerintahannya. Berdasarkan Pengamatan yang dilakukan terdapat nya Pelayanan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang kurang maksimal hal ini disebabkan kepala desa tidak mampu mewujudkan pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan yang baik sesuai prosedur Pemerintahan.

Desa meskom merupakan salah satu dari 17 Desa yang ada di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Desa Meskom memiliki luas wilayah 5400 hektare dengan jumlah kepala keluarga 1015 KK dan Jumlah Penduduk sebanyak 4020 Jiwa.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Meskom Berdasarkan Mata Pencaharian pada Tahun 2011.

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	761
2	Pedagang	43
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	45
4	Honorar	70
5	TNI	0
6	POLRI	0
7	Swasta	71
8	Nelayan	750
9	Buruh Tani	216
10	Pengrajin	30
11	Peternak	10
12	Lainya	2024
Jumlah		4020

Sumber: Kantor Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Tahun 2011

Jumlah penduduk Desa Meskom pada Tahun 2011 berdasarkan mata pencaharian menunjukkan masyarakat yang bermata pencaharian petani sebanyak 761 Orang, bermata pencaharian pedagang sebanyak 43 Orang, masyarakat sebagai PNS sebanyak 45 Orang, sebagai Honorer 70 Orang, masyarakat bermata pencaharian TNI/POLRI sebanyak 0 orang, sebagai swasta sebanyak 71 Orang, bermata pencaharian sebagai Nelayan Sebanyak 750 Orang, Sebagai Buruh Tani 216 Orang, Peternak sebanyak 10 Orang, sebagai Pengrajin sebanyak 30 Orang dan bermata pencaharian lainnya sebanyak 2024 Orang.

Tabel 1.3 Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des) Tahun 2011 Desa Meskom Kecamatan Bengkalis

NO	URAIAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN	BULAN PELAKSANAAN	Capaian Target
I.	Perlengkapan Kantor		
1	Pembelian Printer	Maret	Tercapai
2	Perbaikan Kursi Rapat	Oktober	Tercapai
3	Perbaikan Meja Sidang	Oktober	Tercapai
II.	Perawatan dan Pengelolaan Asset		
1	Servis Sepeda motor dinas	Mei & Desember	Tercapai
2	Pembelian Mobil Ambulan	April & Desember	Belum Tercapai
3	Servis Komputer	Mei & Desember	Tercapai
4	Servis Printer	April & Desember	Tercapai
5	Pembayaran Pajak Sepeda Dinas	Agustus	Tercapai
6	Pembelian Ban Kendaraan Dinas		Tercapai
III.	Keamanan dan Ketertiban		
1	Pembelian Alat Komunikasi	April	Belum Tercapai
2	Renovasi Posko Linmas	Mei	Belum Tercapai
3	Pemberian Bantuan Transport Linmas Jaga Malam	Mei	Tercapai
4	Sosialisasi dan Penarikan Retribusi Toko/PKL/Ruko	April	Belum Tercapai
5	Bantuan Operasional RT RW	Juli	Tercapai
IV.	Kesehatan		
1	Pelatihan Kader Posyandu	Juli	Tercapai
2	Pemberian Bantuan Transport Posyandu Balita	Juli & Desember	Belum Tercapai
V.	Pengentasan Kemiskinan		

1	Pemberian Bahan Pokok	Juli	Tercapai
2	Pemberian Santunan Duafa, Yatim dan Piatu	Juli	Tercapai
3	Pelatihan Pengolahan Produk Pertanian	Juli	Belum Tercapai
4	Pemberian Bantuan Transport Petugas Sampah	Juli	Tercapai
VI.	Pendidikan dan Pelatihan		
1	Pemberian Bantuan Transport Guru TK Dharma Wanita	Juli	Belum Tercapai
2	Pemberian Bantuan Transport Guru TK Al Madaniyah	Juli	Belum Tercapai
3	Pemberian Bantuan Transport Guru PAUD	Juli	Belum Tercapai
4	Pemberian Bantuan Transport Guru TPQ	Juli	Belum Tercapai
5	Pelatihan Kader BKB	Juni	Tercapai
6	Pembelian Alat Permainan Edukatif (APE)	Juli	Belum Tercapai
7	Pelatihan RT / RW	April	Tercapai
8	Pelatihan Merawat Jenazah	September	Tercapai
9	Pelatihan MC dakwah (Remaja Masjid)	September	Tercapai
VII.	Pembangunan		
1	Pembangunan Plengsengan Penyangga Jembatan	Juni	Belum Tercapai
2	Pengecoran Jalan Kampung	September	Belum Tercapai
3	Fisnishing Kantor Desa (Tegel, Tangga, Pagar, Papan Nama)	Maret-April	Tercapai
4	Drainase Jalan Simpang Ayam	Februari	Proses Pengerjaan
5	Renovasi Balai Dusun	Maret - April	Belum Tercapai
6	Pengaspalan Jalan Desa Meskom	Juni	Belum Tercapai
14	Pengaspalan Jalan Simpang Ayam	Oktober	Belum Tercapai

Sumber: Kantor Desa Meskom tahun 2012.

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat program pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan banyaknya yang belum terealisasi dari yang direncanakan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DES) Tahun 2010 - 2014 Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil Observasi langsung ke lokasi penelitian dalam Menyelenggarakan urusan Pemerintahan (Pelayanan), Kepala Desa belum

mewujudkan pelayanan diterapkan oleh pemerintah, disebabsarana dan prasarana kantor desa kurang memadai dan pengalaman kerja kepala desa belum maksimal hal ini sangat mempengaruhi kinerja kepala desa dan staf dalam proses pelayanan.

Didalam sektor pembangunan kepala desa juga belum menyelenggarakan pembangunan yang merata sesuai dengan kebutuhan Masyarakat hal ini disebabkan program pembangunan tidak sesuai dengan Anggaran Dana Desa (ADD), serta minim kemampuan untuk melakukan Lobi dan Presentasi Pembangunan ke Kabupaten. dalam Kemasyarakatan juga belum tercapai hal ini dikarenakan menurunnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan kemasyarakatan.

Demikian besar tugas kepala desa dalam menunjang keberhasilan pembangunan pada suatu desa sehingga perlunya mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah, berdasarkan latar belakang diatas yang telah di uraikan serta permasalahan yang ditemukan penulis di lapangan. Maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisanya dengan melakukan penelitian judul **“ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA PADA DESA MESKOM KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan suatu perumusan masalah yaitu: **Bagaimanakah pelaksanaan tugas kepala desa pada desa Meskom kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yaitu: Untuk mengetahui pelaksanaan Tugas Kepala Desa Pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis dalam menjalankan tugas- tugasnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini memberikan sumbangan wawasan dan pikiran bagi penulis dalam hal pelaksanaan tugas kepala desa pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis.
2. Sebagai sumbangsih informasi dan bahan pertimbangan untuk melaksanakan tugas yang efektif pada Kantor Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan atau dasar penelitian lebih lanjut bagi penelitian lain untuk melakukan kajian atau penelitian dalam aspek yang lain.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini, penulis susun ke dalam enam bab dan masing-masing bab terdiri beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Bab ini menguraikan latar belakang masalah perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II : Telaah Pustaka

Bab ini menguraikan tentang konsep, definisi konsep, konsep operasional/*variable* penelitian, hipotesis.

Bab III: Metode Penelitian.

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Bab IV: Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab ini merupakan bab yang berisikan keberadaan Kantor Desa Meskom kecamatan Bengkalis. struktur organisasi dan uraian tugas sub-sub bagian.

Bab V : Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab ini menguraikan tentang identitas responden, Pelaksanaan Tugas Lembaga Kepala Desa di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Bab VI: Penutup.

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran yang diperlukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Kerangka teori ini merupakan landasan berpikir untuk melaksanakan penelitian dan teori yang dipergunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep dan konstruksi, definisi dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (Singarimbun, 2001: 47).

A. Defenisi Kepemimpinan.

Definisi kepemimpinan menurut Pamudji (2005: 13), antara lain :

1. Kepemimpinan itu nuansanya mengarah kepada kemampuan individu, yaitu kemampuan dari seseorang pemimpin, sedangkan manajemen mengarah kepada sistem dan mekanisme kerja.
2. Kepemimpinan merupakan kualitas hubungan atau interaksi antara si pemimpin dengan pengikut dalam situasi tertentu sedangkan manajemen merupakan status atau wewenang, jadi kepemimpinan menekankan pengaruh terhadap pengikut (wibawa) sedangkan manajemen menekankan kewenangan yang ada.
3. Kepemimpinan menggantungkan diri kepada sumber-sumber yang ada pada dirinya (kemampuan dan kesanggupan) untuk mencapai tujuan,

sedangkan manajemen mempunyai kesempatan untuk menperahkan dana dan daya (*funds and forces*) yang ada didalam organisasi untuk mencapai secara efisien dan efektif.

4. Kepemimpinan diarahkan untuk mewujudkan keinginan si pemimpin, walaupun akhirnya juga mengarah ketercapaiannya kepada tujuan organisasi, sedangkan manajemen mengarah kepadaketercapainya kepada tujuan organisasi secara langsung, sifatnya selalu kolektif, sebab melayani kepentingan perorangan asalpun kepentingan itu masih termasuk dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan bersama yang telah diatur, termasuk dalam pengertian pelayanan umum.

B. Kepemimpinan dalam Perspektif Islam

Kepemimpinan (*leadership*) merupakan salah satu variable penting dalam kehidupan umat, bahkan menjadi faktor. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan masalah kepemimpinan (*leadership*). Hal ini, disebabkan oleh karena Islam memandang bahwa manusia pada dasarnya adalah pemimpin, yaitu wakil Allah SWT di muka bumi, (*khalifatullah fi al-ardh*). Sebagaimana firman Allah S.W.T :

وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خٰلِٖفَةً قَالُوْا
سَبِّحْ اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَ نَحْنُ ذُ
بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya :Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat : Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Berkata mereka : Apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalam nya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji Engkau dan

memuliakan Engkau ? Dia berkata : Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.(QS. Al-Baqarah : 30).

Dari penjelasan ayat diatas dapat dianalisis sesungguhnya Allah akan menciptakan seorang pemimpin dimuka bumi ini yaitu seorang pemimpin (manusia), hal ini mendapat tanggapan dari para malaikat, kenapa seorang manusia yang merusak dan menumpahkan darah hendak engkau jadikan pemimpin ? sementara kami para malaikat yang selalu bertasbih dan memuliakan engkau. Artinya Allah S.W.T Maha mengetahui apa yang ia rencanakan, dan ketika Allah S.W.T merencanakan manusia sebagai pemimpin dimuka bumi ini dapat diartikan bahwa manusialah makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya.

Pimpinan memiliki pemahaman bahwa seseorang yang ditunjuk untuk memiliki tanggung jawab memimpin oleh karena pengangkatan, dalam artian bahwa suka atau tidak suka dari bawahannya, ia akan tetap memimpin bawahan-bawahannya tersebut.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُنْتُمُ رَاعٍ وَكُنْتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ عَلَى بَيْتِ بَعْضِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُنْتُمُ رَاعٍ وَكُنْتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : Ibn Umar r.a berkata : saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang

memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal yang dipimpinnya. (buchary, muslim)

Dari Hadist diatas dapat dianalisis bahwa setiap kamu adalah pemimpin, dari hal yang terkecil yaitu untuk memimpin dirinya sendiri dan memimpin keluarganya serta jika menjadi pemimpi kepala negara atau daerah harus bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Artinya seorang imam (kepala negara) adalah pemimpin dan harus bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.

Pada dasarnya, hadist di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri.

C. Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak ,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi

masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka Pelayanan terhadap Masyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.

Pelaksanaan Otonomi Daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah Kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing - masing.

D. Desa

Desa menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 5, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

Sedangkan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah bahwa : “yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt-istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004)”.

Dengan demikian bahwa pemerintah desa adalah pemerintahan yang terendah yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri.

E. Tipe Desa

Berdasarkan sejarah pertumbuhan desa tersebut setidaknya ada empat tipe desa di Indonesia sejak awal pertumbuhan sampai sekarang.

1. Desa adat (*self-governing community*) Desa adat merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep “otonomi asli” merujuk pada pengertian desa adat ini. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan Negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administrative yang diberikan Negara.
2. Desa administrasi (*local state govenrment*) adalah desa yang merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat.
3. Desa otonom sebagai *local self-government* Desa otonom adalah desa yang dibentuk berdasarkan desentralisasi dengan undang-undang.
4. Desa campuran (adat dan semiotonom), yaitu tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semiotonomi formal.

F. Kewenangan Desa

D.1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusannya sendiri, self-governing community, kemudian diakui oleh pemerintah kolonial sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan akhirnya berkembang menjadi masyarakat hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki lembaga yang mapan yang mengatur kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan. Menurut pendapat Teer Haar, masyarakat hukum adat mempunyai tiga komponen:

Komponen pertama, yaitu bahwa desa merupakan sekumpulan orang yang teratur, berarti bahwa didesa tinggal orang-orang yang membentuk system kemasyarakatan yang teratur.

Komponen kedua, yaitu mempunyai lembaga yang bersifat tetap artinya, masyarakat desa mempunyai lembaga social yang mapan.

Komponen ketiga, yaitu desa mempunyai kewenangan mengurus harta benda, berarti bahwa desa mempunyai harta benda sendiri yang diatur dan diurus oleh masyarakat desa sendiri.

D.2. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.

Dalam UU No.32/2004 tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan ada yang diselenggarakan oleh pemerintahan pusat, ada yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pengaturan tersebut dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan kabupaten kota.

Dalam rangka memperkuat desa, pemerintah mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 30 tahun 2006 tentang tatacara penyerahan urusan pemerintahan kabupaten/kota kepada desa. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa antara lain:

1. Bidang pertanian dan ketahanan pangan;
2. Bidang pertambangan dan energy serta sumber daya mineral;
3. Bidang kehutan dan perkebunan
4. Bidang perindustrian dan perdagangan
5. Bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah
6. Bidang penanaman modal
7. Bidang tenaga kerja dan transmigrasi
8. Bidang kesehatan
9. Bidang pendidikan dan kebudayaan

10. Bidang social
11. Bidang penataan ruang
12. Bidang pemukiman /perumahan
13. Bidang pekerjaan umum
14. Bidang perhubungan
15. Bidang lingkungan hidup
16. Bidang politik dalam negeri dan administrasi public
17. Bidang otonomi desa
18. Bidang perimbangan keuangan
19. Bidang tugas pembantuan
20. Bidang parawisata
21. Bidang pertanahan
22. Bidang kependudukan dan catatan sipil
23. Bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, dan pemerintahan umum
24. Bidang perencanaan
25. Bidang penerangan/informasi dan komunikasi
26. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
27. Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera
28. Bidang pemuda dan olahraga
29. Bidang pemberdayaan masyarakat desa
30. Bidang statistic dan
31. Bidang arsip dan perpustakaan.

Itulah urusan-urusan pemerintahan yang sudah menjadi kompetensi kabupaten/kota yang dapat diserahkan pengaturannya dan pengurusannya kepada desa.

D.3 Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota

Dalam system pemerintahan desentralistik menurut UU No.32/2004, pemerintah pusat menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeri, dan agama.

Sedangkan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sisanya yang mencakup 31 urusan pemerintahan baik berupa urusan wajib maupun urusan pilihan. Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten /kota tersebut diatur dalam PP No. 38/2007.

D.4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Disamping mempunyai kewenangan asli, kewenangan yang diserahkan dari kabupaten/kota, dan tugas pembantuan, desa juga menerima urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepadanya. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa berdasarkan undang-undang sampai saat ini belum ada

G. Penyelenggara Pemerintah Desa

Penyelenggara pemerintah desa berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yaitu:

Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara desa. Unsur-unsur penyelenggara desa sebagai berikut:

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
- b. Unsur Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
 1. Sekretariat desa, yaitu diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
 2. Perangkat Desa lainnya sebagai Berikut:
 - a) Unsur staff adalah unsur pelayanan seperti sekretariat Desa yang dipimpin sekretaris.
 - b) Unsur Pelaksana yaitu unsur pelaksana teknis.
 - c) Unsur Wilayah yaitu pembantu kepala desa di wilayah bagian BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga:

H. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

pemerintah desa BPD. Pemerintahan berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Atas fungsi

tersebut BPD mempunyai wewenang didalam Peraturan Pemerinta nomor 72 tahun 2005, Yaitu:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan anspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertip BPD.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

2.2 Defenisi Konsep

Definisi konsep dimaksudkan untuk menghindari interpretasi ganda dari variabel yang diteliti. Definisi operasional merupakan operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari variabel-variabel tersebut:

1. Desa menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 5, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati.
2. Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sesuai Pasal 14 hingga Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Kepala Desa adalah pemimpin dari desa. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah (lima) 5 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
3. Pelaksanaan Tugas kepala Desa adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana Penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005.

2.3 Konsep Operasional

Menurut Winardi(2007: 42) konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.

Konsep operasional merupakan operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisis dari variabel tersebut

Tabel 2.1 Tabel Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sub indikator
Pelaksanaan tugas kepala desa	1. Pelayanananan	<ul style="list-style-type: none"> - Proses pelayanan - Pelayanan prima - prosedur pelayanan
	2. Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi pembangunan - Proses pembangunan - Kendala pembangunan
	3. Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - program kemsyarakatan - partisipasi kemasyarakatan - kendala-kendala kegiatan kemasyarakatan

Sumber : Data Olahan 2013

2.4 Hipotesis

Hipotesa adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah yang kebenarannya harus dibuktikan melalui data yang terkumpul (Sugiono, 2005: 183). Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan hipotesis, yaitu: *“Diduga Pelaksanaan tugas kepala desa pada Desa Meskom belum maksimal disebabkan penyelenggara urusan pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan belum optimal”*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam waktu 2 bulan dan lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Rencana Penelitian:

Penelitian Laporan : 01 November S.d 15 November 2012

Perbaikan Laporan Penelitian : 15 November 2012 S.d 30 Februari 2013

Laporan Akhir Penelitian : Maret 2013

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis- jenis data menurut Suryabrata (2010; 39):

1. Data Primer

Data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya atau data pokok yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat

2. Data Sekunder

Dari bagian ini menjelaskan sumber data yang diambil dalam penelitian yaitu data sekunder. Data Sekunder adalah data yang penulis dalam bentuk laporan, catatan, dan dokumen melalui kantor tempat penelitian, serta melalui studi kepustakaan, peraturan Perundang-undangan, dan buku-buku yang relevan lainnya.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2009:90) yang menjadipopulasi dalam penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa yaitu 13 orang, dan kepala keluarga yaitu 1015 KK

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2007:91), sementara itu yang dijadikan sampel adalah seluruh jumlah Badan Permusyawaratan Desa yaitu 13 orang sampel, dengan menggunakan metode sensus di mana besaran sampel sama dengan besaran populasi, sementara sampel kepala keluarga diambil sebagai bagian dari populasi dengan menggunakan Rumus Slovin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rumus di bawah ini:

Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = number of samples (Jumlah sample)

N = Total Population (Jumlah seluruh anggota populasi)

e = error tolerance (toleransi terjadinya kesalahan)

$$= 1015$$

$$\frac{1015}{1 + 1015 \times 0,10 \times 0,10}$$

$$= 1015$$

11,15

= 91

Jadi jumlah sample Masyarakat Pada Desa Meskom yang diambil dalam sample penelitian ini sebanyak 91 KK responden.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data tersebut dilakukan dengan cara :

A. Pengamatan langsung atau observation

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif Saebani (2008; 186).

Dalam hal ini penulis secara langsung mengamati pelaksanaan Program Desa Meskom pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis.

B. Wawancara atau *interview*

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan Tanya jawab kepada Kepala BPD dan Kepala seksi sebagai seputar informasi (*Key Informan*) yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu Saebani (2008; 190). Dalam penelitian ini wawancara atau *interview* hanya sebagai *key Informan* atau hanya sebagai kata kunci untuk memulai penelitian.

C. Angket (Questioner)

Questioner adalah pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disebar kepada responden. Arikunto (2002 : 135) Angket dilakukan melalui pertanyaan yang dibuat oleh peneliti untuk para responden dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana masalah evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa di Kecamatan Bengkalik Kabupaten Bengkulu.

3.5. Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Menurut Sugiono (2003:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan variable yang lain. Jadi penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki dengan interpretasi rasional yang akurat kemudian diambil Kesimpulan dan Saran.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Tempat Pelaksanaan Penelitian

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten dari 12 Kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau dengan luas wilayah 7.774,33 km² dan secara administratif terdapat 8 Kecamatan serta pada seluruh kecamatan tersebut terdapat 102 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk 534.417 jiwa yang tersebar pada setiap Kecamatan. Setiap kecamatan memiliki keragaman dalam hal perkembangan Ekonomi, SDM, Sosial dan Budaya yang terus berkembang mengikut perkembangan dan pertumbuhan Masyarakatnya. Sama halnya dengan Desa Meskom Kecamatan Bengkalis yang dimana Desa Meskom yang secara struktural merupakan bagian Integral yang tak terpisahkan dari sistem perwilayahan Kecamatan Bengkalis, secara geografis Desa Meskom terletak setelah Desa Teluk Latak

Desa Meskom memiliki potensi yang cukup strategis dengan luas wilayah 5400 H yang terbagi menjadi 4 Dusun, yakni: Dusun Simpang Merpati, Dusun Simpang Ayam, Dusun Meskom Tengah dan Dusun Prapat Tunggal.

Batas-batas wilayah sebagai berikut :

Utara	: Desa Teluk Latak
Timur	: Pantai Prapat Tunggal
Selatan	: Kecamatan Bantan
Barat	: Desa Sebauk.

4.2 Visi Dan Misi Kantor kepalaDesaMeskomKecamatan.

Visi merupakan gambaran keadaan yang dibayangkan dapat atau ingin dicapai atau diwujudkan pada masa mendatang, merupakan cita-cita yang didukung oleh keadaan sekarang dan merupakan arah bagi pengelolaan lembaga.

Penyertaan misi mengandung secara eksplisit apa yang harus dicapai oleh lembaga dan kegiatan spesifik apa yang harus dilakukan dalam upaya pencapaian tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh lembaga untuk pencapaian visi.

A. Visi Kantor KepalaDesaMeskom

Adapun Visi dari kantor kepala desa Meskom Kabupaten adalah sebagai berikut:
Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Beriman, Bertaqwa, Berbudaya, Memiliki Keunggulan, Trampil Serta Mampu Bersaing Tahun 2020

B. Misi Kantor KepalaDesaMeskom

Sejalan dengan pemikiran visi di atas, maka dirumuskan Misi-misi Kantor kepala Desa Meskom Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

- 1 Membangun Perekonomian Masyarakat Desa Meskom
- 2 Meningkatkan pembangunan di bidang Infrastruktur
- 3 Kesejahteraan masyarakat Meskom

C. Tujuan Kantor KepalaDesaMeskom

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Kantor Kepala Desa Meskom Kabupaten Bengkalis antara lain:
 : Untuk mewujudkan Pengembangan Taraf hidup dan bermutu dalam upaya membangun manusia dan masyarakat yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin, terampil, bertanggung jawab.

D. Sasaran Kantor kepala desameskom

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yaitu terlaksananya program kerjanya dalam tahun anggaran 2008 sesuai dengan tujuan dan harapan yang diinginkan oleh masyarakat desa baik dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan maupun bidang kemasyarakatan.

a. Bidang Pemerintahan.

1. Bidang Pemerintahan. Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang administrasi & manajemen di pihak perangkat dan Lembaga Desa
2. Tata nana birokrasi belum efektif
3. Disiplin kerja dan profesionalisme yang masih rendah
4. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Lembaga- lembaga Desa dengan pihak pemerintahan Desa.
5. Keterbatasan sarana perkantoran dan kurangnya keseimbangan pelayanan masyarakat
6. Sistem pemerintahan yang masih lemah.

b. Bidang Pembangunan.

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya banjir sehingga masih banyak yang memindahkan batubegal dari sungai untuk kepentingan pribadi
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi swadaya pembangunan sarana umum
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat/membangun pagar rumah khususnya yang berhadapan dengan jalan raya
4. Kurangnya kesadaran dalam pemeliharaan slok dan penjagaan kebersihan.

c. Bidang Kemasyarakatan.

1. Masyarakat kurang aktif dalam partisipasi pengambilan kebijakan publik.
2. Jumlah pengangguran untuk penduduk usia kerja masih besar, terutama di kalangan generasi muda.
3. Kurangnya keterampilan dan dedikasi masyarakat dalam berbagai jenis lapangan kerja
4. Sumber penghasilan & pendapatan masyarakat masih sangat rendah

Tabel 1.6 : Jumlah Pegawai Pada Kantor Desa Meskom Tahun 2011.

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala desa	1

2	Sekretaris	1
3	Staf Urusan Umum	3
3	Staf Urusan Pemerintah	2
4	Staf Urusan Keuangan	1
5	Kurir	2
Total Keseluruhan		10 Orang

5. Sumber : Kantor Desa Meskom

Dari tabel di atas jumlah pegawai di Kantor Desa Meskom sebanyak 10 orang yang mana rincian sebagai berikut: kepala desa sebanyak 1 (Satu) Orang, Sekretaris sebanyak 1 (Satu) orang, Staff Urusan Umum sebanyak 3 (Tiga) orang, Staff urusan Pemerintah sebanyak 2 (Dua) Orang, Staff Urusan Keuangan sebanyak 1 (satu) Orang dan Kurir sebanyak 2 (Dua) Orang. Melihat tabel di atas jelas menunjukkan jumlah sarana dan prasarana kurang memadai dalam proses administrasi di Kantor Desa Meskom dibandingkan dengan jumlah pegawai.

4.3 Struktur Organisasi Unit Tempat Kerja Penelitian.

4.4 Uraian Tugas (*job description*) Bagian/Unit Kerja Tempat Penelitian

1. KepalaDesa

KepalaDesamempunyaiugas:

Menyelenggarakanurusanpemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan danketertiban umumsertamelaksanakanurusanpemerintahan
yang dilimpahkanolehBupati

FungsiKepalaDesa:

1. Pelaksanaankegiatanpemerintahdesa;
2. Pelaksanaankegaitanekonomidanpembangunan.
3. Pelaksanaankegaitanperberdayaanmasyarakat dankesejahteraanrakyat
4. Penyelenggaraanketentramandanketertiban umum
5. Pelaksanaankegiatanketatausahaan.

2. Sekretariat.

Sekretarismempunyaiugas pokokMembantukepaladesa

melaksanakan tugas-tugasketatausahaan yang meliputi administrasi,
kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, perencanaan,
evaluasi dan pelaporan.

FungsiSekretarisDesa:

1. Pengkoordinasianpelaksanaantugas dan fungsi kepaladesa;
2. Penyelenggaraankoordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijaka
n yang ditetapkan oleh kepaladesa
3. Pelaksanaan pengurus surat menyurat dan kearsipan
4. Pelaksanaan pengurus administrasi kepegawaian
5. Pengelolaan administrasi keuangan

6. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan desa
7. Penyelenggaraan rapat-rapat dinas, upacara, penerimaan tamu dan acara ke dinas lainnya di luar kegiatan yang telah tercakup dalam seksi lain.

3. Kepala Urusan Umum

Tugas Kepala Urusan Umum:

Membantu kepala desa melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan perlindungan masyarakat.

Fungsi Kepala Urusan Umum:

1. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
2. Penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan perundang-undangan lainnya di desa
3. Pelaksanaan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat dan anggota LINMAS di Kelurahan
4. Pelaksanaan penertiban terhadap gangguan sosial
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Urusan Kemasyarakatan

Tugas Pokok Kepala Urusan Kemasyarakatan:

Membantu kepala desa dalam menyiapkan bahan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan social dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Kepala Urusan Kemasyarakatan:

1. Penyusunan Program Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat
2. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan
3. Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat
4. Pengkoordinasian upaya pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat
5. Pelaksanaan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat
6. Pelaksanaan pemberian pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat.

5. Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas Pokok Kepala Urusan Pemerintahan:

Membantu kepala desa melaksanakan pembinaan pemerintah desa dan pembinaan rukun warga

Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan:

1. Penyusunan program dan kegiatan pemerintah desa

2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah desa
3. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan
4. Pengumpulan dan pengolahan data administrasi pemerintahan
5. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan,
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan, Ketua RW
dan Ketua RT
6. Pelaksanaan administrasi pertanahan
7. Pelaksanaan fasilitas kegiatan dalam rangka pemilihan Kepala
Daerah dan Pemilihan Umum
8. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah
desa
9. Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh atasannya sesuai tugas dan fungsinya

6. Kepala Urusan Perekonomian/ Pembangunan.

Tugas Kepala Urusan Perekonomian/ Pembangunan

Membantu kepala desa dalam melaksanakan Pengendalian,
pembinaan ekonomi pembangunan, koperasi dan UMKM
serta pembangunan partisipasi masyarakat

Fungsi Kepala Urusan Perekonomian/ Pembangunan.

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di
bidang ekonomi dan pembangunan

2. Pelaksanaan fasilitas kegiatan ekonomi pembangunan sertas wadaya masyarakat
3. Perencanaan pembangunan fisik baik program kelurahan maupun atas prakas masyarakat
4. Pelaksanaan pembinaan terhadap koperasi, dan Lembaga Keuangan Mikro formal maupun lembaga keuangan pembiayaan informal
5. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Untuk melanjutkan pembahasan mengenai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis terlebih dahulu penulis tetapkan beberapa identitas responden dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuisisioner tersebut, di bawah ini disajikan data dalam tabel distribusi yang akan dijelaskan satu persatu.

Identitas yang ditentukan untuk memberikan gambaran tentang signifikan antara data responden dengan analisis yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian yang dikaji. Beberapa identitas Responden yaitu:

5.1.1 Jenis Kelamin

Identitas responden berdasarkan jenis kelamin juga termasuk yang pengaruh terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa pada Meskom Kecamatan bengkalis kabupaten Bengkalis

Tabel 5.1: Jumlah Responden BPD dan Kepala Keluarga Pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	92	88,46 %
2	Perempuan	12	11,54 %
	Jumlah Keseluruhan	104	100 %

Sumber: Hasil Penelitian lapangan 2012

Pada tabel 5.1 dapat dianalisa bahwasanya dari 104 responden yang berjenis kelamin laki- laki berjumlah 92 orang atau (88,46%) dan perempuan berjumlah 12 orang (11,54%). dari tabel diatas terlihat bahwasanya antara

responden laki – laki dan responden perempuan lebih besar persentase responden laki-laki. Responden dalam Penelitian ini peneliti mengambil responden dari BPD dan Kepala Keluarga yang terdapat pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis

5.1.2 Umur

Identitas responden berdasarkan umur Identifikasi responden penelitian juga dapat ditinjau dari tingkat umur yang dimiliki karena konsepsi umur merupakan faktor yang turut mempengaruhi cara berfikir, bertindak seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari berdasarkan kematangan dan pengalaman yang telah di jalani selama ini

Tabel 5.2 : Jumlah Responden BPD dan Kepala Keluarga Pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Tingkat Umur.

No	Tingkat umur	Jumlah	Persentase (%)
1	21 – 30 Tahun	23	22,11%
2	31 – 40 Tahun	44	42,31%
3	41 Tahun Keatas	37	35,58%
Jumlah Keseluruhan		104	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Berdasarkan Kuesioner

Pada tabel 5.2 diatas dapat disimpulkan bahwasanya tingkat umur responden dari 104 responden, yang berusia 21-30 tahun berjumlah 23 orang atau (22,11%), yang berusia 31–40 tahun berjumlah 44 orang atau (42,31%) dan untuk umur 41 tahun keatas berjumlah 37 orang atau (35,58%).

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa tingkat umur responden sudah cukup dewasa dalam memberikan tanggapan-tanggapannya terhadap pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini, sebab asumsi penulis adalah kedewasaan umur dapat memberikan isyarat terhadap kemampuan dari seseorang dalam menilai dan

memutuskan suatu permasalahan dengan jalan pikir yang lebih matang dan lebih bijak, karena umur berhubungan dengan seberapa banyak pengalaman yang mereka peroleh.

5.1.3 Pendidikan terakhir

Sepanjang sejarah perkembangan dunia yang bersifat dinamis ini, faktor pendidikan menjadiperhatikan dengan seksama oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal usia. Artinya tuntutan akan pendidikan terus mengitari siklus kehidupan manusia, bahkan pendidikan senantiasa menempati posisi teratas dalam kriteria pencapaian suatu kualitas dan produktivitas yang baik. Pendidikan juga merupakan yang mempengaruhi kinerja para pegawai kepala desa

Tabel 5.3: Jumlah Responden BPD dan Kepala Keluarga Pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD Tidak Tamat	17	16,35%
2	SD Tamat	23	22,11%
3	SMP	19	18,27%
4	SMA	21	20,19%
5	Diploma Tiga (D.3)	6	5,77%
6	Strata Satu (S1)	18	17,31%
Jumlah Keseluruhan		104	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Berdasarkan Kuesioner

Pada tabel 5.3 dapat digambarkan bahwasanya terdapat 6 (Enam) tingkat pendidikan yaitu SD Tidak Tamat, SD Tamat, SMP.SMA, Diploma Tiga (D3), Strata Satu (S1) dari masing- masing pendidikan dapat dijelaskan bahwasanya untuk tingkat SD tidak tamat terdapat 17 Orang atau (16,35%), SD tamat sebanyak 23 orang atau (22,11%), SMP sebanyak 19 orang atau 18,27, SMA

terdapat 21 orang atau (20,19%), tingkat Diploma Tiga 6 orang atau (5,77%), tingkat Strata Satu (S1) 18 orang atau (17,31%).

5.2 Pelaksanaan Tugas Kepala Desa pada Desa Meskom

Menurut Hasibuan (2000:25) mengemukakan sebagai berikut: “Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, mengarahkan dan mengatur segala yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha”.

. Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yaitu: Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan “Urusan Pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa. Yang dimaksud dengan “Urusan Pembangunan” antara lain Pemberdayaan Masyarakat dalam penyediaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum Desa. Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat, seperti bidang Kesehatan, bidang Pendidikan, dan Adat Istiadat.

5.2.1 Pentingnya Kepala Desa

Kepala Desa sebagai aparat Pemerintahan harus mampu mengatur jalannya pemerintahan di desa dan Administrasi kemasyarakatan, peran kepala

desa sangat penting sebagai ujung tombak pemerintahan, tidak hanya itu kepala desa harus mampu berperan dan mempersiapkan perangkat-perangkat pemerintahan baik yang berkaitan dengan rencana jangka panjang menengah desa maupun rencana APBD desa.

5.2.2 Pelayanan

Penyelenggara pemerintah yang tertib dan lancar merupakan syarat utama bagi terwujudnya tujuan Negara. Pemerintah yang tertib dan lancar tidak akan mungkin tercapai kalau segala permasalahan diatur oleh pemerintah pusat saja, tetapi harus dibantu oleh pemerintah daerah.

Menurut Misdayani (2001:19) Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan di daerah, dengan kata lain pemerintah daerah adalah penyelenggara pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah merupakan subsistem dari Negara Indonesia. Oleh sebab itu cita-cita dan tujuan pemerintah daerah, selanjutnya tugas-tugas Negara atau tugas-tugas pemerintah juga merupakan tugas-tugas pemerintahan daerah, akan tetapi tidak semua tugas-tugas atau urusan-urusan pemerintah diserahkan pelaksanaannya kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah, serta kepentingan nasional. Pelaksanaan pemerintah daerah terdiri dari tiga azas, yaitu azas desentralisasi, azas dekonsentrasi dan azas pembantuan. Dengan adanya azas desentralisasi maka terbentuklah Daerah Otonom. Tujuan pemberian Daerah Otonom kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan

pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Menurut Kotler (2002:83) pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Kotler juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum dan sesudah terjadinya transaksi.

Sedangkan Menurut Thoha (2005: 19) Pelayanan prima adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau masyarakat.

Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Bagaimana Pelayanan di desa Meskom

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sudah	19	18,27%
2	Belum	17	16,35%
3	Kurang	47	45,19%
4	Sangat Kurang	21	20,19%
Jumlah		104	100%

Sumber: Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.4 diatas terlihat bahwa dari jumlah 104 responden yang dapat dilihat bahwa yang mengatakan tentang Pelayanan pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis mengatakan sudah sebanyak 19 Orang atau 18,27 %,

responden dan 17 responden menjawab Belum atau 16,35 % menyatakan belum tentang pelayanan pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis. Sementara dari 104 responden yang ditanyakan 42 responden atau 45,19% yang menjawab kurang dan sangat kurang menjawab 21 responden atau 20,19 % responden tentang Tentang pelayanan pada Desa Meskom.

Berdasarkan jawaban responden diatas dapat dianalisis bahwa pelayanan di desa meskom dinilai kurang. Hal ini di buktikan dari tabel 5.4 diatas kebanyakan responden yakni 47 orang atau 45,19% menilai kurang.

Hasil penelitian diatas juga didukung dengan Observasi yang dilakukan bahwan pelaksanaan pelayanannya kurang maksimal, disebabkan minimnya pengetahuan tentang pelayanan yang ditetapkan pemerintah.

Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Desa Meskom Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Yang Ada di Desa Meskom.

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sudah	27	25,96%
2	Belum	19	18,27%
3	Kurang	31	29,81%
4	Sangat Kurang	27	25,96%
Jumlah		104	100%

Sumber: Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.5 diatas terlihat bahwa Desa meskom dalam mewujudkan pelayanan prima pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis bahwasanya ada 27 responden atau (25,96%) yang menjawab Sudah Mewujudkan Pelayanan Prima, 19 responden atau (18,27%) yang menjawab Belum Terwujudnya pelayanan Prima Pada Desa Meskom sedangkan yang menjawab kurang terwujudnya pelayanan prima pada Desa Meskom sebanyak 31 orang atau (29,81%), dan yang menjawab pelayanan prima sangat

kurang 27 responden atau (25,96%). Berdasarkan jawaban responden di atas dapat dianalisis bahwa dalam mewujudkan pelayanan prima di desa meskom dinilai kurang. Hal ini di buktikan dari tabel 5.5 di atas kebanyakan responden yakni 31 orang atau 29,81% menilai kurang.

Hasil penelitian di atas juga didukung dengan Observasi yang dilakukan bahwan pelaksanaan pelayanan prima kurang maksimal, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman tentang standar pelayanan yang diharapkan masyarakat.

Tabel 5.6 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Desa Meskom Dalam Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat Meskom

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sudah	24	23,08%
2	Belum	21	20,19%
3	Kurang	39	37,50%
4	Sangat Kurang	20	19,23%
Jumlah		104	100%

Sumber: Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.6 di atas terlihat bahwa Desa meskom dalam pelayanan prima pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis bahwasanya ada 24 responden atau (23,08) yang menjawab Sudah, 21 responden atau (20,19%) yang menjawab Belumsedangkan yang menjawab kurang pada Desa Meskom sebanyak 39 orang atau (37,50%), dan yang menjawab sangat kurang 20 responden atau (19,23%). Berdasarkan jawaban responden di atas dapat dianalisis bahwa pelayanan prima terhadap masyarakat meskom dinilai kurang. Hal ini di buktikan dari tabel 5.6 di atas kebanyakan responden yakni 39 orang atau 37,50% menilai kurang.

Hasil penelitian di atas juga didukung dengan melakukan pengamatan langsung/ Observasi yang dilakukan bahwan pelaksanaan pelayanan prima pada

masyarakat meskom kurang maksimal, hal ini disebabkan tidak terealisasikan pelayanan yang sudah ditetapkan pemerintah dan lamban nya dalam bekerja hal ini dikarenakan minimnya sarana untuk menunjang keberhasilan dalam pelayanan.

Tabel 5.7 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Pelayanan di Kantor Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Sesuai Prosedur

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sudah	26	25,00%
2	Belum	23	22,11%
3	Kurang	38	36,54%
4	Sangat Kurang	17	16,35%
Jumlah		104	100%

Sumber: Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.7 diatas terlihat bahwa Desa meskom dalam pelayanan pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis bahwasanya ada 26 responden atau (20,00%) yang menjawab Sudah, 23 responden atau (22,11%) yang menjawab Belum sedangkan yang menjawab kurang pada Desa Meskom sebanyak 38 orang atau (36,54%), dan yang menjawab sangat kurang 17 responden atau (16,35%). Berdasarkan jawaban responden diatas dapat dianalisis bahwa pelayanan di kantor desa meskom sesuai prosedur dinilai kurang. Hal ini di buktikan dari tabel 5.7 diatas kebanyakan responden yakni 38 orang atau 36,54% menilai kurang.

Hasil penelitian juga dilakukan dengan pengamatan langsung/observasi pelayanan di kantor desa meskom masih kurang, artinya pelayanan yang dilakukan tidak tepat pada sasaran dan tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Tabel 5.8 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Prosedur Yang di Terapkan Pemerintah Dalam Hal Pelayanan Dapat Berjalan Baik

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sudah	23	22,11%
2	Belum	21	20,19%
3	Kurang	33	31,73%
4	Sangat Kurang	27	25,96%
Jumlah		104	100%

Sumber: Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.8 diatas terlihat bahwa Desa meskom prosedur yang diterapkan pemerintah dalam hal pelayanan dapat berjalan dengan baik pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis bahwasanya ada 23 responden atau (20,19%) yang menjawab Sudah, 21 responden atau (20,19%) yang menjawab Belum sedangkan yang menjawab kurang pada Desa Meskom sebanyak 33 orang atau (31,73%), dan yang menjawab sangat kurang 27 responden atau (25,96%). Berdasarkan jawaban responden diatas dapat dianalisis bahwa prosedur yang diterapkan pemerintah dalam hal pelayanan dinilai kurang. Artinya pelayanan yang sudah ada tidak dijalankan dengan semaksimal mungkin, Hal ini di buktikan dari tabel 5.8 diatas kebanyakan responden yakni 33 orang atau 31,73% menilai kurang.

Tabel 5.9 Rekapitulasi Penilaian Responden Tentang Pelayanan di Desa Meskom

NO	INDIKATOR	KATEGORI PENILAIAN				JML
		S	B	K	SK	
1	Pelayanan di desa meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	19	17	47	21	104
2	Perwujudan Palayanan Prima yang ada di desa meskom	27	19	31	27	104
3	Masyarakat yang masih belum merasakan pelayanan prima di desa meskom	24	21	39	20	104
4	Pelayanan masyarakat di desa meskom Sesuai dengan Prosedur	26	23	38	17	104
5	Prosedur yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal pelayanan dapat berjalan dengan baik	23	21	33	27	104
Jumlah		119	101	188	112	520
Persentase (%)		22,88%	19,42%	36,15%	21,54%	100%

Sumber: Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Tabel 5.9 hasil rekapitulasi tentang pelayanan pada Kantor Desa Meskom 36,15 % responden mengatakan “Kurang” artinya pelaksanaan tugas kepala Desa pada Desa Meskom masih kurang penyelenggara urusan pelayanan yang baik dalam mengoptimalkan Pelayanan yang diterapkan.

Wujud pelayanan pemerintah daerah baik dari provinsi, kabupaten, kecamatan serta kelurahan atau desa merupakan salah satu bentuk dari penyelenggaraan sebuah negara, sehingga pelayanan yang diberikan merupakan

tulang punggung atau pihak penyelenggara yang memegang kemudi dalam pelaksanaan di suatu daerah atau desa. Berdasarkan berbagai sumber data yang diperoleh dapat diketahui bahwa masyarakat masih kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh jajaran perangkat Kepala di Desa Meskom sehingga masyarakat di Desa Meskom kurang merasakan pelayanan yang baik, contohnya dalam pelayanan surat menyurat, pembuatan KTP dan belum terwujudnya pelayanan prima yang memenuhi standar, dan prosedur yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal pelayanan kurang di dijalankan dengan baik.

5.3 Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses yang terus menerus, yang dilakukan terencana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti halnya Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya. Rencana pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk membimbing dan mempercepat pembangunan sosial ekonomi suatu Negara. Kompleksitas yang menyertai pelaksanaan tugas penting ini menyebabkan ia harus dipandang sebagai suatu proses yang menurut kesungguhan, mengingat betapa beratnya pembangunan yang jelas memerlukan cara-cara tertentu untuk merencanakannya.

Menurut Siagian (2005:4), mengatakan bahwa pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu Negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.

Tabel 5.10 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Berjalannya Pembangunan di Desa Meskom

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sudah	19	18,27%
2	Belum	23	22,12%
3	Kurang	41	39,42%
4	Sangat Kurang	21	20,19%
Jumlah		104	100%

Sumber: Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.10 diatas terlihat bahwa Desa meskom dalam pembangunan pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis bahwasanya ada 19 responden atau (18,27%) yang menjawab Sudah, 23 responden atau (22,11%) yang menjawab Belum sedangkan yang menjawab kurang pada Desa Meskom sebanyak 41 orang atau (39,42%), dan yang menjawab sangat kurang 21 responden atau (20,19%). Berdasarkan jawaban responden diatas dapat dianalisis bahwa kemampuan dalam menjalankan roda pembangunan kepala desa meskom kecamatan bengkalis dinilai kurang. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dilapangan dan observasi yang dilakukan dan disebabkan keadaan lokasi pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 5.11 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Pemerataan Pembangunan di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sudah	20	19,23%
2	Belum	22	21,15%
3	Kurang	38	36,54%
4	Sangat Kurang	24	23,08%
Jumlah		104	100%

Sumber: Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.11 diatas terlihat bahwa Desa meskom dalam pemerataan pembangunan pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis bahwasanya

ada 20 responden atau (19,23%) yang menjawab Sudah, 22 responden atau (21,15%) yang menjawab Belum sedangkan yang menjawab kurang pada Desa Meskom sebanyak 38 orang atau (36,54%), dan yang menjawab sangat kurang 24 responden atau (23,08%). Berdasarkan jawaban responden di atas dapat dianalisis tentang pemerataan pembangunan di desa meskom dinilai kurang dari hasil pengamatan langsung penelitian lapangan yang dilakukan. Artinya pembangunan yang direncanakan banyak tidak terlaksana dengan sempurna hal ini disebabkan minimnya Anggaran dana desa (ADD).

Tabel 5.12 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Proses Pembangunan Sesuai Dengan Kebutuhan di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sudah	18	17,31%
2	Belum	24	23,07%
3	Kurang	45	43,27%
4	Sangat Kurang	17	16,35%
Jumlah		104	100%

Sumber: Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.12 di atas terlihat bahwa Desa meskom dalam proses pembangunan sesuai dengan kebutuhan pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis bahwasanya ada 18 responden atau (17,31%) yang menjawab Sudah, 24 responden atau (23,07%) yang menjawab Belum sedangkan yang menjawab kurang pada Desa Meskom sebanyak 45 orang atau (43,27%), dan yang menjawab sangat kurang 17 responden atau (16,35%). Berdasarkan jawaban responden di atas dapat dianalisis tentang proses pembangunan sesuai kebutuhan di desa meskom dinilai kurang. artinya dari hasil penelitian dan observasi yang dilakukan proses pembangunan pada desa meskom banyak terhenti kurang berjalan dengan

sempurna, hal ini dalam pengadaan bahan materian yang dibutuhkan tidak memadai dan kurangnya anggaran yang dibutuhkan.

Tabel 5.13 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Dalam Proses Pembangunan di Desa Meskom Sudah Mewakili Aspirasi Masyarakat Desa Meskom

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sudah	23	22,11%
2	Belum	18	17,31%
3	Kurang	40	38,46%
4	Sangat Kurang	23	22,11%
Jumlah		104	100%

Sumber: Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.13 diatas terlihat bahwa Desa meskom dalam proses pembangunan pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis bahwasanya ada 23 responden atau (22,11%) yang menjawab Sudah, 18 responden atau (17,31%) yang menjawab Belum sedangkan yang menjawab kurang pada Desa Meskom sebanyak 40 orang atau (38,46%), dan yang menjawab sangat kurang 23 responden atau (22,11%). Berdasarkan jawaban responden diatas dapat dianalisis tentang proses pembangunan di desa meskom sudah mewakili aspirasi masyarakat meskom dinilai kurang. Hasil penelitian dan observasi yang dilakukan Hal ini disebabkan kepala desa sebagai pemimpin desa kurang menghiraukan atau kurang serius dalam menanggapi keluhan masyarakat desa meskom.

Tabel 5.14 Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Pembangunan Yang Terkendala di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sudah	15	14,42%
2	Belum	17	16,35%
3	Kurang	37	35,58%
4	Sangat Kurang	35	33,65%
Jumlah		104	100%

Sumber: Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.14 diatas terlihat bahwa Desa meskom tentang pembangunan yang terkendala pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis bahwasanya ada 15 responden atau (14,42%) yang menjawab Sudah, 17 responden atau (16,35%) yang menjawab Belum sedangkan yang menjawab kurang pada Desa Meskom sebanyak 37 orang atau (35,58%), dan yang menjawab sangat kurang 35 responden atau (33,65%). Berdasarkan jawaban responden diatas dapat dianalisis tentang pembangunan yang terkendala dinilai kurang. Hasil penelitian dilapangan dan pengamatan/observasi yang dilakukan, artinya yaitu kepala desa meskom kurang mampu mengatasi pembangunan yang terkendala yang disebabkan minimnya anggaran dana desa untuk pengadaan material yang dibutuhkan.

Tabel 5.15 Rekapitulasi Penilaian Responden Tentang Pembangunan di Desa Meskom

NO	INDIKATOR	KATEGORI PENILAIAN				JML
		S	B	K	SK	
1	Berjalannya Pembangunan Di Desa Meskom	19	23	41	21	104
2	Pemerataan Pembangunan di Desa Meskom	20	22	38	24	104
3	Proses Pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat pada Desa Meskom	18	24	45	17	104
4	Pembangunan Sesuai Aspirasi Masyarakat di desa meskom	23	18	40	23	104
5	Tindak Lanjut Pembangunan Desa Meskom yang Terkendala	15	17	37	35	104
Jumlah		95	104	201	120	520
Persentase (%)		18,27%	20,00%	38,65%	23,08%	100%

Sumber: Data Olah Lapangan 2012

Tabel 5.15 hasil rekapitulasi tentang Pembangunan di Desa Meskom 38,65 % responden mengatakan kurang. Jadi dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas kepala desa Pada Desa Meskom belum maksimal disebabkan pembangunan pada Desa Meskom belum Optimal.

Pembangunan sarana dan prasarana desa merupakan suatu proses untuk memperbaiki perekonomian, politik dan sosial budaya di suatu masyarakat desa. Pembangunan yang baik akan mempermudah masyarakat menuju modernisasi dalam pembinaan masyarakat. Dari berbagai sumber data yang diperoleh dapat diketahui bahwa pembangunan yang dilakukan di Desa Meskom masih belum

optimal ini disebabkan pembangunan yang dilakukan masih tidak merata, pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan aspirasi masyarakat terhadap pembangunan masih kurang ditanggapi oleh Kepala Desa Meskom itu sendiri sertakerangka kerja atau pelaksanaan program pembangunan yang direncanakan kurang terealisasi contohnya dalam pembangunan pengaspalan jalan, drainase atau saluran air dan pos keamanan lingkungan hal ini dipengaruhi dengan anggaran dana yang minim sehingga pembangunan yang dilaksanakan kurang maksimal.

5.4 Kemasyarakatan

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah (*society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Masyarakat di dalam sebuah Komunitas perlu mengadakan kegiatan kemasyarakatan demi tercapai sebuah tujuan dalam sebuah komunitas tersebut. Desa Meskom merupakan Desa yang mengakomodir masyarakat dalam

mencapai tujuan Desa maka perlu melaksanakan kegiatan masyarakat dan melibatkan masyarakat sesuai aspirasi masyarakat tersebut.

Tabel 5.16 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Sudah Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sudah	12	11,54%
2	Belum	15	14,42%
3	Kurang	64	61,54%
4	Sangat Kurang	13	12,50%
Jumlah		104	100%

Sumber: Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.16 diatas terlihat bahwa Desa meskom tentang sudah terlaksananya kegiatan kemasyarakatan pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalibahwasanya ada 12 responden atau (11,54%) yang menjawab Sudah, 15 responden atau (14,42%) yang menjawab Belum sedangkan yang menjawab kurang pada Desa Meskom sebanyak 64 orang atau (61,54%), dan yang menjawab sangat kurang 13 responden atau (12,50%). Berdasarkan jawaban responden diatas dapat dianalisis tentang kegiatan kemasyarakatan dinilai kurang dari hasil penelitian dan observasi yang dilaksanakan, artinya kurang adanya arahan atau sosialisasi antara kepala desa dengan masyarakat untuk membuat kegiatan masyarakat.

Tabel 5.17 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kemasyarakatan di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sudah	24	23,08%
2	Belum	19	18,27%
3	Kurang	41	39,42%
4	Sangat Kurang	20	19,23%
Jumlah		104	100%

Sumber: Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.17 diatas terlihat bahwa Desa meskom tentang partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis bahwasanya ada 24 responden atau (23,08%) yang menjawab Sudah, 19 responden atau (18,27%) yang menjawab Belum sedangkan yang menjawab kurang pada Desa Meskom sebanyak 41 orang atau (39,42%), dan yang menjawab sangat kurang 20 responden atau (19,23%). Berdasarkan jawaban responden diatas dapat dianalisis tentang partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan dinilai kurang. dari hasil penelitian dan observasi yang dilakukan, artinya kurang partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan, disebabkan kurangnya koordinasi atau memberikan arahan kepada ketua RW/RT untuk melaksanakan kegiatan yang sudah diterapkan.

Tabel 5.18 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Menjalankan Kegiatan Kemasyarakatan Sesuai Dengan Aspirasi Kebutuhan Masyarakat di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sudah	16	15,38%
2	Belum	22	21,15%
3	Kurang	44	42,31%
4	Sangat Kurang	22	21,15%
Jumlah		104	100%

Sumber: Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.18 diatas terlihat bahwa Desa meskom tentang menjalankan kegiatan kemasyarakatan sesuai dengan aspirasi kebutuhan pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis bahwasanya ada 16 responden atau (15,38%) yang menjawab Sudah, 22 responden atau (21,15%) yang menjawab Belum sedangkan yang menjawab kurang pada Desa Meskom sebanyak 44 orang atau (42,31%), dan yang menjawab sangat kurang 22 responden atau

(21,15%). Berdasarkan jawaban responden diatas dapat dianalisis tentang menjalankan kegiatan kemasyarakatan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat dinilai kurang. hasil penelitian dan observasi dilapangan ditemukan kegiatan kemasyarakatan kurang terealisasi dengan baik. Dikarenakan kegiatan yang diadakan kurang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Tabel 5.19 Distribusi Frekuensi Responden Tentang Tindak Lanjut Masyarakat Yang Tidak Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kemasyarakatan di Desa Miskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sudah	11	10,58%
2	Belum	28	26,92%
3	Kurang	35	33,65%
4	Sangat Kurang	30	28,85%
Jumlah		104	100%

Sumber: Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.19 diatas terlihat bahwa Desa meskom tentang tindak lanjut masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis bahwasanya ada 11 responden atau (10,58%) yang menjawab Sudah, 28 responden atau (26,92%) yang menjawab Belum sedangkan yang menjawab kurang pada Desa Meskom sebanyak 35 orang atau (33,65%), dan yang menjawab sangat kurang 30 responden atau (28,85%). Berdasarkan jawaban responden diatas dapat dianalisis tentang tindak lanjut masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dinilai kurang. artinya kepala desa kurang memperhatikan kepada masyarakatnya yang aktif dalam kegiatan sehingga tidak mampu menyuarakan betapa penting nya kegiatan tersebut

Tabel 5.20 Distribusi Frekuensi Tentang Tindak Lanjut Kendala Kegiatan Kemasyarakatan di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sudah	25	24,04%
2	Belum	13	12,50%
3	Kurang	36	34,61%
4	Sangat Kurang	30	28,85%
Jumlah		104	100%

Sumber: Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.20 diatas terlihat bahwa Desa meskom tentang tindak lanjut kendala kegiatan kemasyarakatan pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis bahwasanya ada 25 responden atau (24,04%) yang menjawab Sudah, 13 responden atau (12,50%) yang menjawab Belum sedangkan yang menjawab kurang pada Desa Meskom sebanyak 36 orang atau (34,61%), dan yang menjawab sangat kurang 30 responden atau (28,85%) Berdasarkan jawaban responden dan observasi dilapangan dapat dianalisis tindak lanjut kendala kegiatan kemasyarakatan di desa meskom dinilai kurang. artinya kepala desa meskom kurang menindak kegiatan kemasyarakatan dan minimnya pengetahuan kepala desa kendala yang terjadi dilapangan.

Tabel 5.21 Rekapitulasi Penilaian Tentang Kemasyarakatan di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

NO	INDIKATOR	KATEGORI PENILAIAN				JML
		S	B	K	SK	
1	Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan Pada Desa Meskom	12	15	64	13	104
2	Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Masyarakat Pada Desa Meskom	24	19	41	20	104
3	Kesesuaian Menjalankan Kegiatan Kemasyarakatan Dengan Aspirasi Masyarakat pada Desa Meskom	16	22	44	22	104
4	Tindak Lanjut Masyarakat yang Tidak Berpartisipasi pada Kegiatan Kemasyarakatan Pada Desa Meskom	11	28	35	30	164
5	Tindak Lanjut Kendala Kegiatan Kemasyarakatan Pada Desa Meskom	25	13	36	30	104
Jumlah		88	97	220	115	520
Persentase (%)		16,92%	18,65%	42,31%	22,11%	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan 2012.

Dari Tabel 5.21 diatas hasil rekapitulasi tentang Kemasyarakatan di Desa Meskom 42,31% responden mengatakan “Kurang” artinya Pelaksanaan Tugas kepala desa Pada Desa Meskom kurang maksimal disebabkan kegiatan atau program Kemasyarakatan pada Desa Meskom kurang Optimal. Hal dikarenakan menurunnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya kegiatan

kemasyarakatan seperti Gotong royong, Menghadiri pengajian sekali dalam satu minggu.

Didalam melaksanakan peran atau tugasnya, seorang kepala desa haruslah mengenal masyarakatnya dengan baik dari segala aspek sosial kemasyarakatannya agar proses pelaksanaan tugasnya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran kinerjanya dan keinginan masyarakat. Kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa sangat menentukan proses perkembangan suatu desa dalam menuju modernisasi dan peran aktif masyarakatpun sangat mendukung terciptanya pelaksanaan atau penyelenggaraan desa menjadi lebih baik.

Dari berbagai sumber data yang diperoleh dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh desa Meskom masih kurang, kegiatan kemsayarakatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Meskom tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga hal ini berdampak pada peran aktif atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasayarakatanpun masih kurang. Dari pihak kepala desa atau jajaran perangkat desa kurang melakukan tindak lanjut atau sosialisai terhadap pentingnya pastisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarkatan di Desa Meskom masih kurang serta tindak lanjut dari kendala kegiatan kemasyarakatan masih kurang diperhatikan oleh Kepala Desa di Desa Meskom itu sendiri.

Tabel 5.22 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

NO	INDIKATOR	KATEGORI PENILAIAN				JUMLAH
		S	B	K	SK	
1	Pelayanan	119	101	188	112	520
		22.88%	19.42%	36.15%	21.54%	100%
2	Pembangunan	95	104	201	120	520
		18.27%	20.00%	38.65%	23.08	100%
3	kemasyarakatan	88	97	220	115	520
		16.92%	18.65%	42.11%	22.11%	100%
Jumlah		302	302	609	347	1560
Persentase (%)		19.36%	19.36%	39.04%	22.24%	100%

Sumber: data olahan lapangan 2012

Menurut tabel diatas tentang rekapitulasi jawaban respoden Pelaksanaan Tugas Kepala Desa pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan tugas kepala desa meskom, ternyata kebanyakan responden 39.04% menilai kurang serta yang menilai sudah 19.36% dan yang menilai belum 19.36% namun masih ada responden yang menilai sangat kurang yaitu 22.24%.

Dari uraian diatas dapat dianalisis bahwa pelaksanaan tugas kepala desa pada desa meskom dalam melaksanakan tugasnya belum bisa dikatakan baik tetapi kurang, hal ini karena kebanyakan responden menilai kurang bahkan masih ada juga responden yang menilai sangat kurang.

Dari berbagai sumber data yang diperoleh maka diketahui bahwa dari dari indikator pelayanan yang dilakukan oleh Kepala Desa di Desa Meskom masih kurang maksimal dalam proses penyelenggaraan pelayanannya seperti dalam pelayanan surat menyurat membuat KTP , hal ini mencakup dari segala aspek sub indikator pelayanan itu sendiri. Didalam proses pembangunan desa di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis, tugas atau kinerja kepala desa masih sangat kurang dirasakan oleh masyarakat didesanya seperti dalam pembangunan pengaspalan jalan, pos keamanan serta kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di Desa Meskom masih sangat kurang dari harapan untuk menuju masyarakat yang modern serta berkehidupan sosial yang baik. Hal ini mengidentifikasi bahwa pelaksanaan tugas kepala desa pada Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugasnya harus selalu mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya terkait dengan kekurangan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, karena pelaksanaan tugas kepala desa merupakan unsur yang sangat penting dalam perkembangan daerah.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis berdasarkan indikator yaitu

1. Pelayanan dinilai dalam kategori kurang.
2. Pembangunan dinilai dalam kategori kurang.
3. Masyarakat dinilai dalam kategori kurang

Menurut uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas kepala desa pada desa meskom kecamatan bengkalis kabupaten bengkalis dikategorikan masih belum baik dikatakan baik tetapi masih kurang,

karena kebanyakan responden dominan menilai kurang, yaitu 39.04% seperti yang teruraikan pada tabel 5.22

tentang rekapitulasi tanggapan responden terhadap pelaksanaan tugas kepala desa pada desa meskom kecamatan bengkalis kabupaten bengkalis. Artinya bahwa pelaksanaan tugas kepala desa pada desa meskom kecamatan bengkalis kabupaten bengkalis tidak menutup kemungkinan menemui berbagai hambatan atau kendala-

kendala dalam pelaksanaan tugasnya, maupun program nya yang dijalankan, hal ini mengidentifikasi bahwa pelaksanaan tugas kepala desa pada desa meskom kecamatan bengkalis kabupaten bengkalis harus selalu mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas terkait dengan kekurangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya karena kepala desa pemimpin yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan di desa.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah teruraikan di atas demi mencapai pelaksanaan tugas kepala desa pada desa yang lebih baik, penulis ingin mencoba memberikan saran yang mungkin berguna dalam rangka meningkatkan prestasi kerja kepala desa diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) terutama dalam pelaksanaan tugas.
2. Peningkatan pemenuhan sumber daya manusia yang berkemampuan pada staf kantor desa.
3. Pemerintah pusat maupun daerah lebih memperhatikan kondisi penyelenggaraan pemerintahan desa
4. Peningkatan sarana dan prasarana pada kantor desa
5. Kepala desa atau staf kantor desa lebih diharapkan lebih mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan, tidak hanya puas dengan dapat menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya secara baik.
6. Selalu mencari informasi dan belajar dari kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineck Cipta: Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2001. *Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Bratakusuma Supriadi, 2004. *Otonomi penyelenggara Pemerintahan Daerah*, Jakarta, PT. SUN
- FX, Soejadi. 2002. *Organisasi dan Manajemen*. Penerbit Sinar Biru: Bandung.
- Koto. 2009. *Islam dan Kepemimpinan Di Indonesia*. Mazhab: Jakarta.
- Misdayanti, 2001. *Fungsi Pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan Daerah*. Jakarta, Bumi Aksara
- Nurcholis Hanif, 2011, *pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa*. Erlangga, ciracas, Jakarta
- Nurkencana, 2002, *pembinaan Organisasi*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Oetomo, Budi Studjo. 2002. *Perencanaan dan pembangunan*. PT Andi Yogyakarta: Yogyakarta.
- Pemudji, 2005. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta Bumi Aksara
- Saebeni, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Pustaka Setia: Bandung
- Siagian, SP. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Sudijono, Anas. 2005. *Evaluasi Pendidikan*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Syafii Aksara Kencana, 2003, *kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung

Perundangan :

Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998

UUD 1945 Pasal 18 negara Indonesia suatu “eenheidstaat”

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945
Tentang kedudukan dan kekuasaan komite nasional daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992
Tentang perkembangan pembangunan keluarga sejahtera

Undang-undang nomor 22 tahun 1948 tentang pemerintah daerah

UU No.32/2004 tentang pemerintah daerah

PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan

Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Referensi lain :

Al – Qur’an